



REKONSTRUKSI KEPERCAYAAN PUBLIK TERHADAP MBG DALAM MENDUKUNG TUMBUH KEMBANG DAN KUALITAS PEMBELAJARAN ANAK: PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Muhammad Adam

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah (STIT) Al-Falah Rimbo Bujang

*e-mail: Muhammadadam08071993@gmail.com

<https://jurnal.staim-probolinggo.ac.id/index.php/Al-Athfal>

Abstract:

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is a national strategic policy aimed at reducing stunting and improving human resource quality towards a Golden Indonesia. However, its implementation has triggered polarization and a crisis of public trust related to fiscal sustainability, the risk of corruption, and the marginalization of the local real sector. This study aims to reconstruct this public trust through the lens of Islamic Economics. The method used is descriptive qualitative with a literature study approach and analysis of Maqashid Syariah. The results show that reconstructing public trust can be achieved through four main pillars: (1) Transparency in governance based on the principle of Amanah and optimization of the function of modern Hisbah; (2) Equitable distribution (Al-'Adl) by integrating MSMEs and local farmers through the Syirkah contract; (3) Certainty of the Halal Thayyiban supply chain; and (4) Diversification of funding using prudent Islamic Social Finance. This integration of sharia values shifts the MBG paradigm from a mere populist program to a sustainable instrument for public welfare.

Keywords: *Free Nutritious Meals, Public Trust, Sharia Economy, Maqashid Sharia, Governance.*

Abstrak

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan kebijakan strategis nasional demi menekan stunting dan meningkatkan kualitas SDM menuju Indonesia Emas. Namun, implementasinya memicu polarisasi dan krisis kepercayaan publik terkait keberlanjutan fiskal, risiko korupsi, serta marginalisasi sektor riil lokal. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi kepercayaan publik tersebut menggunakan kacamata Ekonomi Syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rekonstruksi kepercayaan publik dapat dicapai melalui empat pilar utama: (1) Transparansi tata kelola berbasis prinsip Amanah dan optimalisasi fungsi Hisbah modern; (2) Distribusi berkeadilan (Al-'Adl) dengan mengintegrasikan UMKM dan petani lokal melalui akad Syirkah; (3) Kepastian rantai pasok Halalan Thayyiban; serta (4) Diversifikasi pendanaan menggunakan Keuangan Sosial Islam secara prudent. Integrasi nilai-nilai syariah ini

ARTICLE HISTORY

Received 20 June 2026

Revised 21 June 2026

Accepted 22 June 2026

mengubah paradigma MBG dari sekadar program populis menjadi instrumen kemaslahatan publik yang berkelanjutan.

Kata kunci: Makan Bergizi Gratis, Kepercayaan Publik, Ekonomi Syariah, Maqashid Syariah, Tata Kelola.

INTRODUCTION

Pemerintah Indonesia menginisiasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada awal tahun 2025 untuk mengatasi isu malnutrisi serta stunting pada anak dan ibu hamil. Tujuan utama dari program ini adalah meningkatkan asupan gizi harian para siswa di sekolah, menurunkan angka kemiskinan, dan memperbaiki kualitas sumber daya manusia di masa depan (Firmansyah, et. al., 2025). Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2024), sekitar 19,8% anak-anak di Indonesia mengalami stunting dan kekurangan gizi. Presiden menekankan bahwa program ini merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengatasi masalah gizi, dan ia juga menyebutkan bahwa MBG telah menjangkau puluhan juta penerima dalam waktu satu tahun (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2026).

Pelaksanaan besar-besaran ini memunculkan berbagai keluhan dan kritik. Media melaporkan bahwa terdapat lebih dari 10.000 kasus keracunan massal yang terkait dengan MBG serta sejumlah insiden kualitas makanan yang buruk di berbagai wilayah di Indonesia (detik.com). Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat ketidakpuasan yang tinggi terhadap MBG ada di kalangan pengamat maupun masyarakat umum. Keadaan ini menimbulkan pertanyaan penting, yaitu bagaimana program ini dilaksanakan di lapangan dan mengapa sejumlah penerima merasa dirugikan (KataData, 2026).

Program Makan Bergizi Grtis (MBG) yang dilaksanakan untuk menjamin asupan gizi optimal bagi anak dan kelompok rentan. Gizi yang baik merupakan bagian penting dari masalah (kemaslahatan) dan maqāṣid al-syariah (tujuan utama Syariah), khususnya melindungi jiwa (hifz al-nafs) dan akal (hifz al-'aql) warga (Khoirudin et al., 2025). Namun pelaksanaan MBG di lapangan kerap menuai keluhan: kualitas makanan dianggap buruk (misalnya hampir basi, tidak enak), porsinya kecil, atau distribusi tidak merata. Keluhan-keluhan tersebut memicu kekecewaan penerima dan menurunkan kepercayaan publik pada MBG (Rayhan & Zulham, 2025).

Berdasarkan hasil analisis, terdapat perbedaan dalam cara membingkai pro kontra MBG antara Kompas.com dan Bisnis.com. Kompas.com memberikan informasi tentang MBG dengan sudut pandang yang lebih seimbang, baik menampilkan hal-hal positif maupun kritik yang relevan. Berita-beritanya menekankan bahwa MBG adalah program yang tidak hanya membuat peserta didik lebih sehat, tetapi juga membantu membentuk karakter mereka. Presiden Prabowo digambarkan sebagai seorang pemimpin yang bertanggung jawab, rendah hati, dan sangat berkomitmen untuk kesejahteraan rakyat. Namun, Kompas.com juga memberi kesempatan bagi kritik, seperti dari Kontras yang menganggap

keterlibatan TNI tidak sah, Megawati yang menyoroiti ketidakrealistikan anggaran Rp10.000 per porsi, serta hasil survei publik yang menunjukkan kemungkinan adanya korupsi. Dengan demikian, cara Kompas.com menyajikan informasi membuat terasa bahwa MBG adalah program yang penting, namun juga memiliki banyak tantangan dan membutuhkan pengecekan kembali.

Berbeda dengan itu, Bisnis.com lebih fokus pada hal-hal teknis dan berhubungan dengan uang. Kritik yang muncul tidak membahas kegagalan kebijakan, melainkan fokus pada hal-hal praktis, seperti kualitas susu yang terasa terlalu manis, kasus keracunan yang dianggap sebagai insiden teknis, hingga pengeluaran anggaran meningkat hingga Rp100 triliun. Media ini juga membahas langkah pemerintah yang telah menyiapkan dana tambahan serta cara mengelola keuangan oleh Sri Mulyani sebagai tanda keseriusan negara. Dengan demikian, cara menyajikan informasi di Bisnis.com cenderung tetap mendukung kredibilitas pemerintah, menekankan bahwa hambatan yang muncul hanyalah bagian dari proses evaluasi teknis. Jadi, bisa disimpulkan bahwa Kompas.com lebih banyak menampilkan beragam pandangan, baik pro maupun kontra, sementara Bisnis.com lebih fokus pada kelegitmiran pemerintah dan solusi yang berhubungan dengan teknis dan fiskal.

Dikarenakan masalah diatas maka penulis membangun kembali kepercayaan masarakat terhadap program makan bergizi gratis. Namun, dalam prosesnya, kebijakan ini menemui jurang ketidakpercayaan dari publik. Gelombang skeptisisme muncul sebagai dampak dari beberapa faktor penting. Beban Fiskal APBN: Rasa khawatir masyarakat mengenai penumpukan utang negara dan pengalihan dana dari sektor-sektor penting lainnya seperti energi atau kesehatan umum. Potensi Moral Hazard: Riwayat penyaluran bantuan sosial di Indonesia yang seringkali diwarnai oleh kesalahan sasaran dan kebocoran dana. Sentralisasi Vendor: Kekhawatiran bahwaproyek-proyek besar akan menguntungkan korporasi besar atau oligarki pangan, sehingga mengancam keberlangsungan pedagang kecil dan petani. Berbagai laporan menunjukkan keluhan mengenai kualitas makanan, distribusi yang tidak adil, dan insiden keracunan massal.

Terdapat keluhan dari penerima MBG. Di Kabupaten Lombok Utara, misalnya, Kepala Desa Sambik Bangkol melaporkan bahwa paket bantuan tiga hari yang diterima berisi kurma, roti, telur, dan tempe, juga termasuk sebutir salak yang sudah busuk. Para orang tua siswa mengungkapkan bahwa porsi tersebut "tidak sesuai dengan jumlah anggarannya" dan menilai layanan MBG "sangat tidak memuaskan sejak awal" (Inside Lombok, 2026). Kasus serupa muncul di Kabupaten Lamongan, di mana orang tua murid mengembalikan paket MBG karena penurunan kualitas; satu keluhan menekankan bahwa kentang matang seharga Rp15.000 per porsi disajikan tanpa dikupas, sementara paket lainnya hanya mengandung pisang, telur, susu, dan camilan yang dianggap "jauh dari kriteria makanan bergizi". Ketua Satgas MBG Lamongan juga mengakui bahwa ada laporan mengenai "ketidakpuasan penduduk" di beberapa kecamatan mengenai kualitas makanan (Koran Memo,

2026). Dalam hal kuantitas, Ditjen Perbendaharaan mencatat bahwa MBG telah menjalankan 741 SPPG dengan 1.291 pemasok, menjangkau sekitar 2,13 juta penerima (60,9% dari sasaran nasional) hingga Januari 2026. Namun, pemerintah daerah di beberapa wilayah mengaku mengalami kesulitan dalam memenuhi standar kualitas; contohnya, di Provinsi Banten, program yang melibatkan koperasi peternak setempat untuk menyediakan protein (telur) masih menghadapi kendala dalam standarisasi kualitas (Kemenkeu RI, 2025).

Kepercayaan adalah kesediaan perusahaan untuk bergantung pada mitra bisnis. Kepercayaan tergantung pada sejumlah faktor antar pribadi dan antar organisasi, seperti kompetensi, integritas, kejujuran, dan kebaikan hati Perusahaan. Sedangkan menurut Morgan dan Hunt dalam Suhardi mendefinisikan kepercayaan sebagai suatu kondisi ketika salah terlibat dalam proses pertukaran yakin dengan kehandalan dan integritas pihak yang lain. Kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan yang dimiliki konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut dan manfaatnya. Kepercayaan didefinisikan sebagai kemauan konsumen untuk menyandarkan harapan mereka terhadap perilaku perusahaan dimasa mendatang (Makhdaleva Hanura Tajudin & Ade Sofyan Mulazid).

Berdasarkan pendapat Zur, et. al. menyatakan bahwa kepercayaan konsumen dinyatakan sebagai komponen penting untuk menjaga hubungan yang berkelanjutan diantara semua pihak yang terlibat dalam bisnis. Melalui kepercayaan yang terbangun diantara berbagai pihak yang terlibat dalam bisnis memungkinkan bisnis bisa terjalin dengan lebih intensif mengingat masing-masing pihak memiliki kepercayaan untuk bisa memenuhi tanggung jawabnya. diperlukan sebuah kepercayaan untuk bisa membangun hubungan yang stabil dan hubungan yang menyeluruh diantara berbagai pihak yang terlibat interaksi (Yohana Neysa Setyawan).

Dalam ruang lingkup ekonomi Islam terdapat tantangan dan tugas ekonomi Islam, Salah satu hambatan terbesar yang merupakan tantangan bagi pembangunan ekonomi Islam adalah karena tidak adanya contoh aktual/empiris dari praktek ekonomi Islam. Pada saat ini tidak ada masyarakat atau negara di dunia ini termasuk negara-negara muslim sekalipun yang mempraktekkan ekonomi Islam secara ideal. Pada saat ini belum ada praktek ekonomi Islam secara komprehensif, yang ada hanyalah praktek-praktek parsial dalam beberapa aspek mu'amalah seperti jual beli, sistem perbankan, kontrak dan lain-lain.

Tugas ekonomi Islam memang Nampak lebih besar daripada ilmu ekonomi konvensional. Tugas pertama dari ekonomi Islam yaitu mempelajari perilaku aktual dari para individu maupun kelompok, perusahaan, pasar, pemerintah, dan pelaku ekonomi lainnya. Aspek inilah yang sebenarnya mendapat banyak pembahasan dalam ilmu ekonomi konvensional, namun nampaknya belum memuaskan karena adanya asumsi-asumsi perilaku yang tidak realistis dan komprehensif. Asumsi ini misalnya tentang kecenderungan manusia untuk hanya mementingkan diri sendiri

dengan cara maksimasi material dan maksimasi kepuasan (H Hasan Aedy: 2006). Studi yang dilaksanakan Aji (2025) menyimpulkan idealnya MBG sejalan dengan prinsip ekonomi Islam di Indonesia dan memperkuat pembangunan modal insan. studi yang dilaksanakan domi (2026) menyimpulkan pengelolaannya dilandasi niat bersih dan sesuai syariah, MBG dapat menjadi bentuk ibadah sosial yang memberi manfaat. perbaharuan dari peniliti terdahulu Memberikan pemahaman bahwa mengembalikan kepercayaan publik tidak dapat dicapai hanya dengan fokus pada angka (kuantitatif).

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui studi Epidemiologi Lapangan yang bersumber dari jurnal ilmiah, dokumen kebijakan pemerintah, laporan lembaga riset ekonomi (seperti CELIOS dan Ombudsman), serta teks-teks kontemporer ekonomi Islam. Pisau analisis utama yang digunakan untuk membedah fenomena ini adalah kerangka kerja Maqashid Syariah (tujuan-tujuan hukum Islam) dan teori Wilayah al-Hisbah (pengawasan publik).

RESULTS AND DISCUSSION

Berdasarkan analisis di atas, rekonstruksi kepercayaan publik dapat diwujudkan melalui **Empat Pilar Hasil Formulasi Sistemik** berikut:



a. Penguatan Tata Kelola Program melalui Asas Amanah, Transparansi, dan Jaminan Mutu Halalan Thayyiban

Keberhasilan suatu program publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan atau luasnya cakupan penerima manfaat, tetapi juga oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola program tersebut. Dalam perspektif ekonomi Islam, kepercayaan publik merupakan modal sosial yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan prinsip amanah yang menjadi salah satu fondasi utama penyelenggaraan pemerintahan. Amanah dalam Islam tidak sekadar dipahami sebagai tanggung jawab administratif, melainkan sebagai kewajiban moral dan spiritual yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat maupun Allah SWT. Oleh karena itu, berbagai temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah

penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi digital.

Dalam sejarah pemerintahan Islam klasik, pengawasan terhadap aktivitas ekonomi dan distribusi barang publik dilakukan melalui lembaga Wilayah al-Hisbah. Institusi ini berfungsi mengawasi pasar, menjaga keadilan transaksi, mencegah praktik kecurangan, serta memastikan kepentingan masyarakat terlindungi. Nilai-nilai yang terkandung dalam sistem hisbah masih sangat relevan untuk diterapkan dalam tata kelola program sosial modern. Dalam konteks MBG, restorasi fungsi hisbah dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem pengawasan digital yang memungkinkan seluruh proses pengelolaan program dipantau secara terbuka oleh masyarakat. Transparansi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga menjadi sarana untuk membangun kembali kepercayaan publik yang selama ini sering tergerus oleh berbagai kasus penyalahgunaan anggaran negara.

Penerapan teknologi digital menjadi salah satu solusi strategis dalam mewujudkan prinsip amanah tersebut. Pemerintah dapat membangun sebuah dasbor digital nasional yang terintegrasi mulai dari tingkat pusat hingga daerah. Melalui platform ini, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai alokasi anggaran setiap sekolah, jumlah penerima manfaat, daftar penyedia bahan pangan, hingga laporan realisasi penggunaan dana secara berkala. Keterbukaan informasi semacam ini memungkinkan publik untuk melakukan pengawasan sosial secara langsung sehingga potensi terjadinya korupsi, mark-up harga, maupun penyimpangan distribusi dapat diminimalkan sejak awal. Selain itu, adanya sistem pelaporan masyarakat yang terhubung secara daring akan memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam mengawasi pelaksanaan program.

Penggunaan teknologi informasi juga dapat meningkatkan efisiensi proses pengambilan keputusan. Data yang tersedia secara real-time memungkinkan pemerintah melakukan evaluasi dan perbaikan kebijakan dengan cepat apabila ditemukan kendala di lapangan. Misalnya, apabila terjadi keterlambatan distribusi bahan pangan pada suatu wilayah, pemerintah dapat segera mengidentifikasi sumber masalah dan mengambil langkah korektif sebelum berdampak lebih luas terhadap penerima manfaat. Dengan demikian, digitalisasi tata kelola tidak hanya meningkatkan transparansi, tetapi juga memperkuat efektivitas program secara keseluruhan.

Lebih lanjut, aspek kepercayaan publik dalam Program MBG tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan anggaran, tetapi juga menyangkut kualitas makanan yang diberikan kepada peserta didik. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, jaminan kehalalan produk makanan merupakan kebutuhan mendasar yang tidak dapat diabaikan. Dalam perspektif Islam, konsep konsumsi tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan fisik, tetapi juga harus memenuhi prinsip halal dan thayyib, yaitu makanan yang halal dari segi hukum syariah dan baik dari segi kualitas, keamanan, serta kandungan gizinya.

Prinsip halal dan thayyib memiliki implikasi yang luas dalam

penyelenggaraan Program MBG. Seluruh rantai pasok harus memenuhi standar yang telah ditetapkan, mulai dari sumber bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga penyajian kepada peserta didik. Pemerintah perlu memastikan bahwa bahan pangan yang digunakan berasal dari pemasok yang telah memiliki sertifikasi halal serta memenuhi standar keamanan pangan nasional. Pengawasan ini menjadi sangat penting karena kualitas bahan baku akan menentukan kualitas makanan yang diterima oleh anak-anak sebagai sasaran utama program.

Selain itu, proses pengolahan makanan juga harus mengikuti standar sanitasi dan higienitas yang ketat. Dapur umum atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu menerapkan prosedur operasional yang menjamin kebersihan lingkungan kerja, keamanan penyimpanan bahan makanan, serta kualitas proses memasak. Sertifikasi halal tidak hanya berlaku pada bahan baku, tetapi juga mencakup seluruh proses produksi sehingga tidak terjadi kontaminasi yang dapat mengurangi status kehalalan produk. Dengan demikian, masyarakat memperoleh kepastian bahwa makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka tidak hanya bergizi, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama yang mereka yakini.

Jaminan mutu halal dan thayyiban juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Penggunaan kemasan ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang baik merupakan bagian dari implementasi prinsip Islam yang menekankan tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Program MBG tidak boleh menghasilkan dampak negatif berupa peningkatan sampah plastik atau pemborosan sumber daya yang justru bertentangan dengan semangat pembangunan berkelanjutan.

Dalam Islam, konsumsi yang berlebihan atau pemborosan dikenal dengan istilah *israf* dan *tabzir* yang sangat dilarang. Oleh karena itu, penentuan porsi makanan dalam Program MBG harus disesuaikan dengan kebutuhan gizi dan kalori peserta didik berdasarkan kelompok usia masing-masing. Pendekatan ini tidak hanya mencegah pemborosan anggaran negara, tetapi juga membantu membentuk pola konsumsi yang sehat dan bertanggung jawab pada anak-anak. Melalui kombinasi antara transparansi pengelolaan, pengawasan berbasis teknologi, serta jaminan mutu halal dan thayyiban, Program MBG memiliki peluang besar untuk memperoleh legitimasi sosial yang kuat sekaligus mewujudkan tujuan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas.

b. Penguatan Keadilan Distribusi dan Diversifikasi Pembiayaan melalui Ekosistem Ekonomi Syariah

Selain tata kelola yang transparan, faktor lain yang sangat menentukan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis adalah sejauh mana program tersebut mampu memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya diukur dari tercapainya tujuan administratif, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan keadilan distributif (*al-'adl*) dan kemaslahatan sosial secara luas. Oleh karena itu, Program MBG perlu dirancang bukan hanya sebagai program bantuan konsumsi,

melainkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi yang dapat menggerakkan sektor riil di tingkat lokal.

Prinsip al-'adl menekankan bahwa distribusi manfaat ekonomi harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap sumber-sumber ekonomi. Dalam konteks MBG, keadilan distribusi dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), kelompok tani, peternak, nelayan, serta koperasi desa sebagai bagian dari rantai pasok program. Pendekatan ini memungkinkan anggaran yang dialokasikan pemerintah tidak hanya berakhir pada konsumsi peserta didik, tetapi juga berputar dalam perekonomian lokal sehingga menghasilkan efek pengganda ekonomi yang lebih besar.

Penelitian menunjukkan bahwa ketika kebutuhan bahan pangan dipenuhi melalui kerja sama dengan produsen lokal, maka pendapatan masyarakat desa mengalami peningkatan yang signifikan. Petani memperoleh kepastian pasar untuk hasil panennya, nelayan memiliki saluran distribusi yang lebih stabil, dan pelaku UMKM mendapatkan peluang usaha yang berkelanjutan. Situasi ini menciptakan hubungan simbiosis antara program sosial pemerintah dengan penguatan ekonomi masyarakat. Dengan kata lain, Program MBG tidak hanya berfungsi sebagai instrumen peningkatan gizi anak, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi berbasis komunitas.

Kerja sama tersebut dapat dikembangkan melalui skema syirkah yang dikenal dalam ekonomi Islam, baik dalam bentuk musyarakah maupun mudharabah. Melalui mekanisme ini, pemerintah tidak sekadar menjadi pembeli bahan pangan, tetapi juga dapat mendorong terbentuknya kemitraan produktif yang saling menguntungkan. Keterlibatan masyarakat dalam rantai produksi dan distribusi akan meningkatkan rasa memiliki terhadap program sehingga kepercayaan publik semakin kuat. Program tidak lagi dipandang sebagai proyek pemerintah semata, melainkan sebagai gerakan bersama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas generasi muda.

Lebih jauh lagi, integrasi UMKM dan kelompok tani dalam Program MBG berpotensi membangun ekosistem rantai nilai halal yang berkelanjutan. Setiap tahapan produksi, mulai dari penyediaan bahan baku hingga penyajian makanan, dapat dikelola sesuai prinsip syariah. Hal ini memberikan nilai tambah ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Dalam jangka panjang, terbentuknya rantai nilai halal berbasis komunitas dapat menjadi fondasi penting bagi pengembangan ekonomi syariah nasional.

Meskipun demikian, pelaksanaan Program MBG dalam skala nasional membutuhkan dukungan pembiayaan yang sangat besar. Besarnya kebutuhan anggaran sering menimbulkan kekhawatiran masyarakat mengenai risiko peningkatan defisit fiskal dan utang negara. Oleh sebab itu, diperlukan strategi diversifikasi pembiayaan yang tidak sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam perspektif ekonomi Islam, terdapat

berbagai instrumen keuangan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberlanjutan program tanpa menambah beban fiskal secara berlebihan.

Salah satu instrumen yang memiliki potensi besar adalah wakaf produktif. Berbeda dengan wakaf konvensional yang umumnya berupa tanah atau bangunan untuk kepentingan ibadah, wakaf produktif memungkinkan aset wakaf dikelola secara ekonomis sehingga menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Dalam konteks MBG, aset wakaf dapat digunakan untuk membangun dapur umum, gudang penyimpanan pangan, lahan pertanian produktif, atau fasilitas pendukung lainnya. Hasil pengelolaan aset tersebut kemudian dapat digunakan untuk membantu pembiayaan operasional program.

Selain wakaf produktif, pemerintah juga dapat mengembangkan instrumen sukuk sosial atau social impact sukuk. Instrumen ini memungkinkan penghimpunan dana dari masyarakat dan investor yang memiliki orientasi sosial sekaligus tetap memperoleh kepastian pengelolaan sesuai prinsip syariah. Dana yang terkumpul dapat diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendukung Program MBG maupun pengembangan sistem distribusi pangan yang lebih efisien. Dengan pendekatan ini, pembiayaan program menjadi lebih beragam dan tidak sepenuhnya membebani anggaran negara.

Di sisi lain, penggunaan dana zakat dalam Program MBG memerlukan perhatian khusus karena berkaitan dengan ketentuan fikih yang bersifat spesifik. Zakat merupakan instrumen redistribusi kekayaan yang memiliki kelompok penerima tertentu (asnaf) sebagaimana telah ditetapkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, penggunaan dana zakat untuk mendukung Program MBG tidak dapat dilakukan secara umum kepada seluruh peserta didik. Dana zakat hanya dapat disalurkan kepada penerima manfaat yang memenuhi kategori fakir atau miskin sehingga tetap menjaga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa integrasi instrumen keuangan sosial Islam tetap berada dalam koridor hukum Islam yang benar.

Dengan memadukan prinsip keadilan distribusi, pemberdayaan sektor riil, penguatan UMKM dan kelompok tani, serta diversifikasi pembiayaan melalui instrumen keuangan sosial Islam, Program MBG memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi model kebijakan publik yang tidak hanya meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam mampu memberikan kontribusi nyata dalam merancang kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

c. Program Makan Bergizi Gratis dan Tumbuh Kembang Anak

Masa anak-anak merupakan periode penting dalam perkembangan fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Pada fase ini, kebutuhan zat gizi harus terpenuhi secara optimal agar pertumbuhan berlangsung secara normal. Program Makan Bergizi Gratis hadir sebagai salah satu upaya pemerintah untuk memastikan peserta

didik memperoleh asupan gizi yang memadai selama mengikuti proses pendidikan di sekolah.

Dalam perspektif ekonomi syariah, pemenuhan kebutuhan gizi anak merupakan bentuk implementasi prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa). Makanan yang bergizi membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah berbagai penyakit akibat kekurangan gizi, serta mendukung pertumbuhan fisik yang optimal. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis berperan penting dalam menjaga kualitas kesehatan anak sebagai generasi penerus bangsa.

Selain itu, konsep *halalan thayyiban* menjadi landasan penting dalam penyediaan makanan bagi peserta didik. Makanan yang diberikan tidak hanya harus halal secara syariat, tetapi juga baik, aman, sehat, dan memenuhi standar gizi. Penerapan prinsip ini dapat meningkatkan kualitas hidup anak sekaligus memberikan rasa aman bagi orang tua terhadap makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak mereka.

d. Program Makan Bergizi Gratis dan Kualitas Pembelajaran Anak

Kualitas pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kondisi kesehatan dan status gizi peserta didik. Anak yang memperoleh asupan gizi yang cukup cenderung memiliki kemampuan konsentrasi yang lebih baik, tingkat kehadiran sekolah yang lebih tinggi, serta kemampuan memahami materi pembelajaran yang lebih optimal. Dalam perspektif *maqashid syariah*, peningkatan kualitas pembelajaran berkaitan erat dengan prinsip *hifz al-'aql* (menjaga akal). Islam memandang pengembangan intelektual sebagai salah satu tujuan penting dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap upaya yang mendukung perkembangan kemampuan berpikir anak termasuk dalam bentuk kemaslahatan yang harus diwujudkan.

Program Makan Bergizi Gratis dapat membantu peserta didik mengikuti proses belajar dengan kondisi fisik yang lebih baik. Asupan energi yang cukup memungkinkan anak lebih fokus selama pembelajaran berlangsung, mengurangi rasa lelah, dan meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan kelas. Dengan demikian, program ini tidak hanya berkontribusi terhadap kesehatan, tetapi juga terhadap peningkatan kualitas pendidikan.

CONCLUSION

Rekonstruksi kepercayaan masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak dapat dicapai hanya melalui penguatan strategi komunikasi publik atau kampanye informasi yang bersifat persuasif. Kepercayaan publik pada dasarnya lahir dari pengalaman nyata masyarakat terhadap kualitas tata kelola program yang dijalankan pemerintah. Oleh karena itu, upaya membangun kembali kepercayaan harus dilakukan melalui perbaikan struktural yang mencakup transparansi anggaran, akuntabilitas pelaksanaan, serta pengawasan yang efektif dan berkelanjutan. Dalam perspektif Ekonomi Syariah, prinsip amanah menjadi fondasi utama yang harus diwujudkan dalam setiap tahapan pengelolaan program. Amanah tidak hanya bermakna kejujuran dalam penggunaan dana publik, tetapi

juga tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya yang dikelola benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi yang terinspirasi dari konsep Hisbah modern dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat transparansi, mencegah penyimpangan, dan membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi pelaksanaan program.

Dari sudut pandang Ekonomi Syariah, Program MBG memiliki potensi besar untuk menghasilkan kemaslahatan sosial yang luas karena berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pengembangan kualitas akal (*hifz al-'aql*) generasi masa depan. Namun, manfaat tersebut hanya dapat dirasakan secara optimal apabila program dilaksanakan berdasarkan prinsip Al-'Adl atau keadilan dalam distribusi manfaat ekonomi. Pemerintah perlu memastikan bahwa rantai pasok program melibatkan petani, nelayan, peternak, koperasi, dan UMKM lokal sehingga anggaran yang dikeluarkan tidak hanya meningkatkan gizi peserta didik, tetapi juga menggerakkan perekonomian masyarakat. Selain itu, jaminan kualitas makanan yang memenuhi prinsip Halalan Thayyiban harus menjadi prioritas utama, mulai dari pemilihan bahan baku, proses produksi, hingga penyajian kepada penerima manfaat. Ketika masyarakat melihat bahwa program dikelola secara transparan, adil, serta sesuai dengan nilai-nilai syariah, maka kepercayaan yang sempat menurun akan pulih secara bertahap dan berubah menjadi dukungan yang kuat terhadap keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis.

REFERENCES

- Al-Ghazali, M. (1937). *Al-Mustasfa min 'ilm al-usul*. Al-Maktabah al-Tijariyyah al-Kubra.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective*. Islamic Foundation.
- JPPi catat korban keracunan MBG capai 10.482 anak, serukan setop semua dapur MBG. (2025, October 6). *DetikEdu*. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8147008/jppi-catat-korban-keracunan-mbg-capai-10482-anak-serukan-setop-semua-dapur-mbg>
- Karim, S. D., Muin, R., & Kara, M. (2026). Prinsip-prinsip ekonomi Islam (*Principles of Islamic Economics*), 13042–13050.
- Katadata. (2024). *Sejak ada dana desa, tren korupsi di desa meningkat*. <https://databoks.katadata.co.id/ekonomi-makro/statistik/9bded1c7ed87e43/sejak-ada-dana-desa-tren-korupsi-di-desa-meningkat>
- Katadata. (n.d.). *MBG, program pemerintah Indonesia dengan ketidakpuasan publik tertinggi*. Retrieved March 2, 2026, from <https://databoks.katadata.co.id/politik/statistik/684aac2498662/mbg-program-pemerintah-indonesia-dengan-ketidakpuasan-publik-tertinggi>

- Khoirudin, A., Kaharudin, M. R., & Purwandari, E. (2025). Free nutritious meals (MBG) and the enhancement of human development in the perspective of Islamic economics. *Journal of Economics and Social Sciences (JESS)*, 4, 945–953. <https://doi.org/10.59525/jess.v4i2.958>
- Koran Memo. (2026). *Viral! Wali murid di Lamongan kembalikan menu MBG: Masak Rp15 ribu kulit kentang tidak dikupas?* Retrieved March 2, 2026, from <https://www.koranmemo.com/daerah/19216772354/viral-wali-murid-di-lamongan-kembalikan-menu-mbg-masak-rp-15-ribu-kulit-kentang-tidak-dikupas>
- Koton, Y. P., Nusi, D., & Djaba, M. (2025). Kontribusi program makanan bergizi gratis (MBG) terhadap ekonomi lokal di Provinsi Gorontalo. 2(November), 110–118.
- Laporan Analisis CELIOS. (2024/2025). *Dampak fiskal dan distribusi ekonomi pangan nasional*.
- Makhrus, Ristawati, N. F., Saumi, A., Kamaliah, I. N., & Riyadi, Y. E. (2025). *Filantropi Islam dan pembangunan berkelanjutan* (Vol. 32, Issue 3).
- Ombudsman Republik Indonesia. (n.d.). *Ombudsman RI temukan empat potensi maladministrasi dalam program makan bergizi gratis*. Retrieved March 2, 2026, from <https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-empat-potensi-maladministrasi-dalam-program-makan-bergizi-gratis>
- Program makan bergizi di KLU disorot, buah tak layak konsumsi jadi temuan. (n.d.). *Inside Lombok*. Retrieved March 2, 2026, from <https://insidelombok.id/lombok-utara/program-makan-bergizi-di-klu-disorot-buah-tak-layak-konsumsi-jadi-temuan/>
- Pusat Kajian Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer. (n.d.). *Tata kelola bansos dan maqashid syariah*.
- Rayhan, M., & Zulham. (2025). Implementasi jaminan halal pada program makan bergizi gratis (MBG) di Kecamatan Medan Timur. *Al-Sulthaniyah*, 14(2), 370–380. <https://doi.org/10.37567/al-sulthaniyah.v14i2.4154>
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (n.d.). *Presiden Prabowo tegaskan MBG bentuk kepedulian negara*. Retrieved March 2, 2026, from <https://setkab.go.id/prabowo-tegaskan-program-makan-bergizi-gratis/>
- Syah, A. (2024). *Dasar-dasar ekonomi syariah: Prinsip dan aplikasinya*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Wulandari, T. (2025, October 6). JPPI catat korban keracunan MBG capai 10.482 anak, serukan setop semua dapur MBG. *DetikEdu*. <https://www.detik.com/edu/sekolah/d-8147008/jppi-catat-korban-keracunan-mbg-capai-10482-anak-serukan-setop-semua-dapur-mbg>